



Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Konawe

K. Made Suarma¹, Amarudin², Fahrudin³, Eki Aprianto Maranai⁴, Muhamad Abil Hasbul⁵
Marthen Duma⁶, Fitriah Sunggu⁷, Rola Pola Anto^{8*}

^{1,2,3,4,5,6,7*}Program Studi S2 Administrasi Publik, Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia

mgflorflora@gmail.com, wawoniaamar@gmail.com, ekiapriantomaranai9@gmail.com,
fahrysumarata@gmail.com, marhenduma834@gmail.com, muhamadabil231182@gmail.com,
*rola.polaanto70@gmail.com

Abstrak

Implementasi kebijakan pencegahan stunting masih menghadapi kendala atau masalah sehingga belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah unsur pimpinan, kepala bidang, staf pegawai serta unsur posyandu. Teknik penentuan informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe yakni adanya landasan kebijakan yang jelas, dukungan dan komitmen pemerintah daerah, terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting, keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga, serta tersedianya sumber pembiayaan program, dukungan politik dari pimpinan daerah juga ditemukan sudah relatif baik. Faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe yakni belum merata pemahaman pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan, komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan dan ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia, anggaran operasional serta sarana prasarana, belum optimalnya integrasi data, pembagian peran antarorganisasi yang belum sepenuhnya rinci, perbedaan komitmen pelaksana, keterbatasan ekonomi keluarga, serta pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbatasan dana operasional untuk kegiatan pendampingan, kunjungan lapangan, dan penyuluhan. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe.

Kata Kunci: Faktor Pendukung, Penghambat, Implementasi, Kebijakan, Stunting, Konawe.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menetapkan akselerasi penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai kebijakan yang upaya pencegahan stunting harus dilakukan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Pendekatan konvergensi menempatkan pencegahan stunting sebagai tanggung jawab bersama berbagai sektor, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor pendidikan, sanitasi, air minum, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi, integrasi program, serta kolaborasi antar organisasi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Keberhasilan suatu kebijakan publik dari perspektif administrasi publik, tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan kebijakan dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kebijakan yang dirancang secara baik tidak akan mampu mencapai tujuan apabila pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar organisasi, komunikasi yang tidak efektif, rendahnya komitmen pelaksana, serta kurangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan program percepatan penurunan stunting.

Kabupaten Konawe sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara turut melaksanakan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, posyandu, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program yang dilaksanakan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian

makanan tambahan, edukasi gizi, peningkatan sanitasi, penyediaan air minum layak, serta pemberdayaan masyarakat melalui kader pembangunan manusia dan kader posyandu.

Meskipun berbagai program tersebut telah berjalan, implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe namun masih menghadapi faktor penghambat sebagai tantangan yang harus minimalisir. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal, kualitas pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa masih beragam, literasi masyarakat mengenai gizi dan pola asuh anak belum merata, serta masih terdapat keterbatasan anggaran dan sarana pendukung di beberapa wilayah. Di sisi lain, kondisi geografis dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target penurunan stunting tidak hanya bergantung pada besarnya program yang dilaksanakan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan pada tingkat daerah.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keterkaitan yang kuat dari enam dimensi dapat mendorong keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan publik tentang stunting, khususnya kebijakan yang melibatkan banyak organisasi pelaksana seperti percepatan penurunan stunting. Teori ini dinilai relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe.

Kajian mengenai stunting selama ini lebih banyak berfokus pada aspek kesehatan masyarakat, status gizi, determinan biologis, maupun evaluasi capaian program intervensi gizi spesifik. Penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan pencegahan stunting dari perspektif administrasi publik, khususnya menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada konteks Kabupaten Konawe, masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi melalui penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi capaian program, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lintas sektor.

Meskipun telah banyak riset yang diteliti dilaksanakan para ahli dan peneliti, maka penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe. Penelitian ini berusaha mengungkapkan kondisi empirik dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan di Kabupaten Konawe. Hasil studi dapat memberi kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendorong akselerasi pencegahan stunting serta memberi kontribusi upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hasil studi ini dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah Kabupaten Konawe dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pencegahan stunting dengan memperkuat tata kelola kolaboratif, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mempercepat penurunan stunting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.

METODE

Tempat Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi didasarkan pada realitas masih tingginya angka stunting meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, serta belum banyak kajian mendalam menggunakan kerangka teori tersebut. Objek kajian meliputi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Pemerintah Desa, kader Posyandu, dan masyarakat sasaran.

Penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena sosial melalui data non numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk memahami makna dan proses sosial dari perspektif partisipan, dengan realitas dipandang bersifat majemuk, dinamis, dan kontekstual (Nur & Anto, 2025).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Kabupaten Konawe terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data berupa informasi, pendapat, persepsi, pengalaman, dan penjelasan dari informan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara (interview) dan observasi mengenai proses implementasi kebijakan pencegahan stunting. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan dokumen resmi, seperti data prevalensi dan jumlah kasus stunting, jumlah sasaran program, data anggaran dan realisasi program, cakupan pelayanan, serta data capaian kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) DPPKB Kabupaten Konawe dan dokumen terkait lainnya.

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi terhadap informan yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang pencegahan stunting, mengkaji dokumen perencanaan daerah, laporan kegiatan, data prevalensi stunting, dokumen TPPS, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data penelitian tentang analisis implementasi kebijakan pencegahan stunting dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Konawe melalui tahapan (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Data penelitian yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis sejak mulai pengumpulan data sampai berakhir dengan menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Nur & Anto (2025: 141-142) sebagai berikut: (1) reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Konawe

Implementasi kebijakan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Konawe dapat terlaksana dengan dukungan beberapa faktor sebagai berikut:

Komitmen Pimpinan Daerah

Komitmen pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam mendukung implementasi kebijakan. Bupati beserta jajaran pemerintah daerah menunjukkan dukungan melalui penerbitan berbagai kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penetapan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas daerah. Komitmen tersebut mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan program.

Ketersediaan dan Peran Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Keberadaan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari unsur bidan, kader PKK, dan kader KB, menjadi faktor pendukung yang sangat penting. TPK berperan melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran, memberikan edukasi mengenai gizi dan kesehatan, melakukan pemantauan ibu hamil, bayi, dan balita, serta menyampaikan laporan perkembangan kepada instansi terkait. Kehadiran kader yang aktif membantu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Dukungan Anggaran

Pelaksanaan program percepatan penurunan stunting didukung oleh ketersediaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Konawe, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dukungan Dana Desa. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, seperti penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan, peningkatan kapasitas kader, operasional pendampingan keluarga, dan kegiatan monitoring serta evaluasi. Dukungan pembiayaan yang memadai memungkinkan berbagai program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Koordinasi Lintas Sektor yang Baik

Keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Konawe juga didukung oleh koordinasi yang baik antarinstansi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, serta organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi secara rutin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kolaborasi tersebut mempermudah penyelesaian berbagai kendala di lapangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Partisipasi masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta kader Posyandu turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, mengikuti penyuluhan, serta membawa balita ke Posyandu secara rutin. Pemerintah desa juga berperan melalui dukungan kebijakan desa dan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, alat antropometri, serta media edukasi menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program. Sarana tersebut memudahkan petugas kesehatan dan kader dalam melakukan pengukuran status gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil sinergi antara komitmen pemerintah, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta tersedianya sarana dan prasarana. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi dan koordinasi antar lembaga, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung. Oleh karena itu, semakin kuat faktor-faktor pendukung tersebut, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Konawe.

Faktor Penghambat**Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Jumlah tenaga kesehatan, penyuluh KB, serta kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di beberapa wilayah belum sebanding dengan jumlah sasaran yang harus didampingi. Selain itu, masih terdapat perbedaan kemampuan teknis kader dalam melakukan pendampingan, pencatatan data, maupun edukasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum dapat menjangkau seluruh keluarga sasaran secara optimal.

Kendala Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Konawe serta kondisi geografis beberapa desa yang relatif jauh dari pusat pelayanan kesehatan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Akses transportasi yang terbatas menyebabkan petugas kesehatan dan kader membutuhkan waktu serta biaya yang lebih besar untuk melakukan pendampingan dan monitoring. Akibatnya, frekuensi kunjungan kepada keluarga berisiko stunting di wilayah tertentu menjadi kurang optimal.

Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor

Meskipun koordinasi antar lembaga telah berjalan, pada pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa belum optimalnya sinkronisasi program, pertukaran data, dan pembagian tugas antar-OPD maupun pemerintah desa. Perbedaan prioritas program serta keterlambatan penyampaian informasi terkadang menghambat pelaksanaan kegiatan secara terpadu. Kondisi ini menyebabkan beberapa intervensi belum terlaksana secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Rendahnya Literasi Gizi dan Kesadaran Masyarakat

Masih rendahnya pemahaman masyarakat di Kabupaten Konawe mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola asuh anak, kesehatan ibu hamil, serta sanitasi menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan yang kurang mendukung upaya pencegahan stunting, seperti kurang memperhatikan asupan gizi balita, tidak rutin memanfaatkan pelayanan Posyandu, atau masih mempercayai berbagai mitos terkait pemberian makanan bagi ibu hamil dan anak. Rendahnya literasi tersebut menyebabkan proses perubahan perilaku memerlukan waktu yang lebih lama.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Di beberapa wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Konawe masih terdapat keterbatasan sarana pendukung, seperti alat antropometri, media edukasi, fasilitas Posyandu, serta jaringan internet untuk mendukung pelaporan berbasis digital. Kondisi ini menghambat proses pemantauan pertumbuhan balita, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, dan penyampaian laporan secara cepat dan akurat.

Keterbatasan Anggaran pada Tingkat Pelaksana

Walaupun pemerintah daerah Kabupaten Konawe telah menyediakan anggaran untuk program percepatan penurunan stunting, pada tingkat pelaksana di desa atau kecamatan masih terdapat keterbatasan dana operasional untuk kegiatan pendampingan, kunjungan lapangan, maupun penyuluhan kepada masyarakat. Keterbatasan tersebut berdampak pada intensitas pelaksanaan kegiatan dan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan temuan penelitian, hambatan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, efektivitas koordinasi, kondisi lingkungan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi antar lembaga, karakteristik organisasi pelaksana, serta kondisi sosial masyarakat merupakan faktor yang dapat mengurangi efektivitas implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, pemerataan sarana dan prasarana, serta peningkatan literasi gizi masyarakat menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut sehingga tujuan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan kondisi empirik dalam penelitian ini maka faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe di Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

1. komunikasi antar organisasi dan pemahaman terhadap standar serta sasaran kebijakan menjadi faktor penentu utama. Meskipun kebijakan telah memiliki landasan hukum dan target yang jelas, belum meratanya pemahaman di seluruh tingkatan pelaksana serta lemahnya sinergi penyampaian informasi antar sektor menyebabkan program belum berjalan terpadu dan terarah secara seragam.
2. ketersediaan dan pemerataan sumber daya, meliputi sumber daya manusia yang terlatih, anggaran yang memadai, sarana prasarana pendukung, serta sistem data yang terintegrasi. Keterbatasan dan ketidaksamaan distribusi sumber daya di berbagai wilayah menjadi penghambat nyata dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal.
3. karakteristik organisasi pelaksana dan disposisi pelaksana. Belum rincinya pembagian peran serta pedoman operasional antarinstansi, ditambah dengan beragamnya tingkat komitmen dan pemahaman pelaksana di lapangan, menyebabkan pelaksanaan program masih berjalan secara parsial dan belum menyatu dalam satu gerakan bersama.

4. kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dukungan politik dari pimpinan daerah sebenarnya sudah sangat baik, namun hal tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kondisi ekonomi keluarga yang masih terbatas serta pemahaman sosial budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan stunting.

Teori Van Meter dan Van Horn saling berkaitan erat; namun ketidakseimbangan dalam pemenuhan dan keselarasan dimensi komunikasi, sumber daya, kelembagaan, serta kondisi lingkungan menjadi faktor paling dominan dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe belum berjalan secara maksimal, meskipun perencanaan dan komitmen di tingkat atas sudah terbangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe antara lain adanya landasan kebijakan yang jelas, dukungan dan komitmen pemerintah daerah, terbentuknya TPPS, keterlibatan berbagai OPD dan pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga, serta tersedianya sumber pembiayaan program. Dukungan politik dari pimpinan daerah juga ditemukan sudah relatif baik.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Konawe meliputi belum meratanya pemahaman pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan, komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan dan ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia, anggaran operasional serta sarana prasarana, belum optimalnya integrasi data, pembagian peran antarorganisasi yang belum sepenuhnya rinci, perbedaan komitmen pelaksana, keterbatasan ekonomi keluarga, serta pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Pada tingkat desa dan kecamatan juga masih ditemukan keterbatasan dana operasional untuk kegiatan pendampingan, kunjungan lapangan, dan penyuluhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti menghaturkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada segenap pimpinan dan informan penelitian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Dan juga terkhusus pada Dosen Pengampu mata kuliah Bapak Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si yang selalu bersedia memberikan bimbingan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, S., Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti., Narita, Y. A., & Putra, M. F. P. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya*. Sukoharjo: Tahta Media Group
- Anggara, S., (2018), *Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>.
- Anjani, D. M., Nurhayati, S., & Immawati. (2024). Penerapan pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang stunting pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Metro Utara. *Jurnal Cendikia Muda*, 4(1), 62–69.
- Ode Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: A global perspective. *Maternal & Child Nutrition*, 12 (1), 12–26. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>.
- Islami, N. W., & Khourouh, U. (2021). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi balita stunting dan tantangan pencegahannya pada masa pandemi*. Karta Rahardja, 3(2), 6–19.
- Nur, M., & Anto, R. P. (2025). *Metodologi penelitian bidang ekonomi dan manajemen: Untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi*. Kramantara JS.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250–265. <https://doi.org/10.1179/2046905514Y.0000000158>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study guide: Stunting dan upaya pencegahannya bagi mahasiswa kesehatan masyarakat*. CV Mine.
- Syahrudin. (2021). *Seri implementasi kebijakan publik: Konsep dan teori implementasi kebijakan publik*. Nusamedia. ISBN 978-623-6982-22-8.